

ABSTRAK

Zahra Mutia Bayruni : “Evaluasi Kebijakan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta”

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta harus mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. Namun fenomena yang terjadi adalah target yang ditetapkan tidak mampu terealisasi pada tahun 2018-2020. Selain itu, didukung dengan tidak memadainya fasilitas penunjang yakni jumlah armada penyedotan kakus yang tersedia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sumber daya aparatur; kelembagaan; sarana, prasarana dan teknologi; finansial; dan regulasi penyelenggaraan kebijakan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus di Kabupaten Purwakarta.

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan Leo Agustino yaitu Sumber Daya Aparatur; Kelembagaan; Sarana, Prasarana dan Teknologi; Finansial; dan Regulasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai evaluasi kebijakan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi, serta menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi kebijakan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta pada intinya sudah berjalan dengan baik yang terlihat dari beberapa dimensi, yakni Sumber Daya Aparatur, Kelembagaan dan Regulasi. Namun ada beberapa dimensi yang belum berjalan dengan baik dikarenakan lokasi pemukiman masyarakat dan berbagai fasilitas penunjang bagi pelaksanaan kebijakan retribusi penyedotan tinja. Selain itu, penentuan pendapatan retribusi penyedotan tinja yang tidak memperhatikan beberapa potensi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Maka dari itu, perlu adanya kriteria bagi pengguna pelayanan penyedotan tinja, penambahan jenis armada baru dengan ukuran yang dapat menjangkau lokasi-lokasi yang dianggap tidak memungkinkan untuk melakukan pelayanan penyedotan, dan penentuan target yang harus disesuaikan dengan berbagai potensi yang dimiliki.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah.